

Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Dita Anggraeni Dewi¹, Ida Farida²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 18, 2026

Revised Januari 20, 2026

Accepted Januari 26, 2026

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,
Kartu Identitas Anak (KIA),
Kesadaran Masyarakat,
Administrasi Kependudukan.

Keywords:

Policy Implementation,
Child Identity Card (KIA)
Public Awareness
Population Administration.

ABSTRAK

Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pemerintah Kota Bandar Lampung bertujuan untuk memberikan identitas resmi kepada anak-anak dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat KIA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan kebijakan KIA oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan analisis yang didasarkan pada teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin, yang mencakup aspek fungsi rutin, kinerja dan dampak kebijakan, serta kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA telah berjalan cukup baik secara administratif dan prosedural, tetapi dampaknya terhadap peningkatan kesadaran dan pemanfaatan KIA oleh masyarakat belum optimal. Faktor pendukung meliputi komitmen aparatur, kejelasan prosedur pelayanan, dan program jemput bola, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sosialisasi, serta belum optimalnya integrasi pemanfaatan KIA dalam layanan publik.

ABSTRACT

The Child Identity Card (KIA) program of the Government of Bandar Lampung City aims to provide official identity for children and to educate the public about the benefits of KIA. This study aims to examine the implementation of the KIA policy by the Department of Population and Civil Registration of Bandar Lampung City, as well as the factors that support and hinder its implementation. Through observation, interviews, and documentation, this research employs a descriptive qualitative method with analysis based on Ripley and Franklin's policy implementation theory, which includes aspects of routine functions, policy performance and impacts, and compliance. The results of the study indicate that the implementation of the KIA policy has been carried out relatively well in administrative and procedural aspects; however, its impact on increasing public awareness and the utilization of KIA has not yet been optimal. Supporting factors include the commitment of officials, clear service procedures, and outreach programs, while inhibiting factors include low public awareness, limited socialization, and the suboptimal integration of KIA utilization in public services.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Dita Anggraeni Dewi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung
Lampung, Indonesia
Email: dita.22111021@student.ubl.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang cukup luas dengan populasi hampir 284 juta jiwa. Kondisi ini menuntut adanya sistem administrasi kependudukan yang akurat dan tertata dengan baik. Administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara melalui pemberian identitas resmi. Identitas hukum menjadi dasar bagi negara dalam mengenali status warga serta memberikan akses terhadap berbagai layanan publik, seperti perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan sistem administrasi kependudukan yang tertib menjadi prasyarat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk anak-anak, diwajibkan memiliki dokumen identitas yang diakui secara hukum sesuai dengan peraturan pemerintah. Warga negara berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk verifikasi identitas. Sementara itu, agar semua warga negara, termasuk anak-anak, dapat terdaftar secara resmi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pemerintah harus menyediakan bentuk identifikasi yang sah bagi penduduk di bawah usia 17 tahun. SIAK dirancang sebagai sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola dan mengorganisir administrasi kependudukan Indonesia, termasuk pendaftaran sipil dan pengumpulan data demografis [1].

Pemerintah pusat meluncurkan Program Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak-anak berusia 0 hingga 17 tahun guna mencapai tujuan tersebut. Bagi anak-anak yang belum menikah berusia di bawah 17 tahun, Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota menerbitkan KIA sebagai identitas resmi. Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pengumpulan data kependudukan, perlindungan anak, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya anak-anak yang belum memiliki identitas nasional melalui SIAK, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas program nasional ini.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen identitas resmi bagi anak di bawah usia 17 tahun yang berfungsi layaknya KTP bagi orang dewasa. KIA dibedakan ke dalam dua kategori usia, yaitu anak usia 0–5 tahun dan 5–17 tahun, dengan masa berlaku yang berbeda. Secara fungsi, kedua jenis KIA memiliki kegunaan yang sama, meskipun terdapat perbedaan pada tampilan foto dan fitur kartu. Program KIA diharapkan memberikan perlindungan administratif bagi anak serta menjadi dasar dalam berbagai keperluan administratif, seperti pendaftaran sekolah, penerbitan dokumen kependudukan, dan akses layanan publik lainnya. Kehadiran KIA juga diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan kependudukan terkait anak serta memudahkan pihak yang membutuhkan identitas resmi anak [2].

Tabel 1. Capaian kepemilikan KIA di wilayah Kota Bandar Lampung

Tahun Jumlah anak	Jumlah anak wajib KIA 0-17 tahun	Memiliki	Tahun Jumlah anak	Jumlah anak wajib KIA 0-17 tahun
2023	308.668	177.787	130.881	57,6%
2024	306.138	263.908	42.230	86,21%

Sumber: Dispendukcapil Kota Bandar Lampung, 2025

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, cakupan kepemilikan KIA di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan signifikan dari 57,6% pada tahun 2023 menjadi 86,21% pada tahun 2024. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya identitas anak. Lonjakan capaian kepemilikan KIA lebih banyak dipengaruhi oleh intensifikasi program pelayanan jemput bola serta dorongan administratif dari sekolah dan lembaga layanan publik yang mulai mensyaratkan KIA, bukan dari kesadaran mandiri masyarakat.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat program Kartu Identitas Anak. Beberapa orang tua mungkin tidak melihat perlunya mengajukan permohonan KIA karena mereka masih beranggapan bahwa identitas seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran [3]. Rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan orang tua mengenai fungsi KIA juga berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi dalam kepemilikan KIA [4]. Bahkan, sebagian masyarakat yang telah memiliki KIA belum memahami manfaat dan nilai guna kartu tersebut secara optimal, sehingga pemanfaatan KIA dalam kehidupan sehari-hari masih terbatas [5].

Berdasarkan deskripsi ini, sangat penting untuk menyelidiki bagaimana Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerapkan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat KIA, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi alami objek penelitian, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, proses, dan dinamika implementasi kebijakan secara lebih komprehensif dibandingkan pendekatan kuantitatif [6]. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari data empiris yang diperoleh di lapangan menuju pemaknaan yang lebih luas terhadap fenomena yang diteliti [7].

Sebagai instansi yang berwenang melaksanakan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), penelitian ini dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Posisi strategis Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan dan penggunaan KIA, serta kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi penelitian. Dengan memilih lokasi ini, peneliti dapat memperoleh data yang relevan mengenai pelaksanaan kebijakan KIA di tingkat daerah.

Wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Narasumber diwawancarai untuk memahami lebih lanjut tentang perspektif, pengalaman, dan pemahaman mereka terkait pelaksanaan kebijakan KIA. Pengamatan langsung terhadap prosedur layanan dan aktivitas yang terkait dengan masalah KIA dilakukan. Melalui pemeriksaan catatan resmi yang relevan, laporan kegiatan, dan arsip, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, undang-undang dan peraturan, laporan lembaga, serta literatur pendukung penelitian, sedangkan data primer diperoleh langsung dari informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan KIA. Sampling purposif, yaitu pemilihan informan berdasarkan faktor-faktor tertentu dan relevansinya dengan fokus penelitian, digunakan untuk memilih informan penelitian guna memperoleh informasi yang lebih rinci dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga interpretasi hasil penelitian. Reduksi data dilakukan untuk memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh, penyajian data dilakukan untuk menyusun data secara terstruktur, sedangkan

penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan validitas data. Triangulasi teknik melibatkan perbandingan temuan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi sumber melibatkan perbandingan data dari beberapa informan. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dijelaskan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerapkan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bandar Lampung melalui berbagai mekanisme pelayanan, termasuk layanan kantor reguler, program jangkauan ke sekolah-sekolah, dan penggunaan sistem administrasi kependudukan, menurut temuan studi tersebut. Pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan bagi anak. Secara umum, implementasi kebijakan KIA telah berjalan cukup baik dari sisi administratif dan prosedural, namun belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan KIA oleh masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan KIA telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah anak yang memiliki identitas resmi. Program jemput bola, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta penyederhanaan prosedur pelayanan menjadi faktor yang mendorong peningkatan kepemilikan KIA di Kota Bandar Lampung. Selain itu, keberadaan KIA mulai dikenal oleh masyarakat sebagai bagian dari dokumen kependudukan yang penting bagi anak. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan KIA dalam berbagai layanan publik belum sepenuhnya merata, sehingga masih terdapat perbedaan antara capaian administratif kebijakan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.

1. Dimensi Kepatuhan (Compliance)

Pada dimensi kepatuhan, aparatur Disdukcapil Kota Bandar Lampung pada umumnya telah menjalankan pelayanan KIA sesuai dengan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan. Pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara konsisten, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi data, hingga penerbitan KIA. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaksana kebijakan telah terbentuk secara struktural dalam organisasi pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin yang menyatakan bahwa kepatuhan pelaksana dan kelompok sasaran terhadap aturan kebijakan merupakan indikator penting keberhasilan implementasi [8].

Namun, kepatuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan masih relatif rendah. Sebagian orang tua belum menganggap KIA sebagai kebutuhan utama, sehingga pengurusan KIA sering dilakukan hanya ketika terdapat dorongan dari sekolah atau program jemput bola. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan kebijakan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku masyarakat. Dengan demikian, dimensi kepatuhan dalam implementasi kebijakan KIA dapat dikategorikan cukup berhasil, tetapi masih memerlukan penguatan melalui sosialisasi dan edukasi kebijakan yang lebih intensif.

2. Dimensi Rutinitas Fungsi (Smoothly Functioning Routines)

Pada dimensi rutinitas fungsi, implementasi kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Bandar Lampung telah berjalan sebagai bagian dari aktivitas kerja organisasi. Pelayanan KIA dilakukan secara rutin melalui pembagian tugas yang jelas, mekanisme pelayanan di loket, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Program jemput bola ke sekolah juga menjadi bagian dari strategi pelayanan untuk menjaga kontinuitas penerbitan KIA. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan KIA telah terlembaga dalam sistem kerja aparatur dan mampu menjaga stabilitas pelayanan administrasi kependudukan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Andini (2023) yang menyatakan bahwa kebijakan

administrasi kependudukan dapat berjalan efektif apabila didukung oleh struktur organisasi, prosedur pelayanan, dan sumber daya yang memadai [9].

Namun, rutinitas kebijakan belum sepenuhnya terbentuk pada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Pengurusan KIA oleh masyarakat belum menjadi kebiasaan mandiri, melainkan masih bergantung pada momentum tertentu, seperti kegiatan sekolah atau program pelayanan kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa rutinitas kebijakan belum terinternalisasi dalam perilaku masyarakat. Dengan demikian, dimensi rutinitas fungsi dapat dinilai berjalan baik pada level organisasi, tetapi belum optimal pada level masyarakat.

3. Dimensi Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki (Desired Performance and Impacts)

Pada dimensi kinerja dan dampak yang dikehendaki, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA telah menghasilkan peningkatan jumlah kepemilikan KIA secara administratif. Namun, peningkatan tersebut belum diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan KIA secara luas dalam berbagai layanan publik. Banyak orang tua yang telah memiliki KIA belum menggunakannya secara optimal, sehingga tujuan kebijakan untuk menjadikan KIA sebagai identitas anak yang fungsional belum tercapai sepenuhnya. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mahsyar (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan output administratif dalam implementasi kebijakan tidak selalu diikuti oleh dampak sosial apabila pemanfaatan kebijakan belum terintegrasi dengan layanan publik lainnya [10].

Selain itu, masyarakat masih memandang KIA sebagai persyaratan administratif sesaat, bukan sebagai identitas anak yang digunakan secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja kebijakan masih terbatas pada capaian output administratif dan belum menghasilkan outcome berupa perubahan perilaku masyarakat secara signifikan. Dengan demikian, dimensi kinerja dan dampak kebijakan KIA di Kota Bandar Lampung dapat dikategorikan belum optimal, meskipun secara administratif menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui berbagai mekanisme pelayanan, seperti pelayanan reguler di kantor, program jemput bola ke sekolah, serta pemanfaatan sistem administrasi kependudukan. Pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan bagi anak. Secara umum, implementasi kebijakan KIA telah berjalan cukup baik dari sisi administratif dan prosedural, namun belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan KIA oleh masyarakat.

Ditinjau dari tiga dimensi implementasi kebijakan, pada dimensi kepatuhan aparaturnya pelaksana telah menjalankan kebijakan sesuai regulasi dan SOP, sementara kepatuhan masyarakat masih bervariasi. Pada dimensi rutinitas fungsi, pelayanan KIA telah berjalan rutin dan terstruktur di tingkat organisasi, tetapi belum menjadi kebiasaan mandiri masyarakat. Pada dimensi kinerja dan dampak yang diharapkan, implementasi kebijakan KIA telah meningkatkan kepemilikan identitas anak secara administratif, namun belum menghasilkan perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan KIA secara optimal dalam berbagai layanan publik. Dengan demikian, implementasi kebijakan KIA di Kota Bandar Lampung dapat dikategorikan cukup berhasil, tetapi masih memerlukan penguatan strategi sosialisasi, pemerataan akses pelayanan, serta integrasi pemanfaatan KIA dalam layanan publik agar tujuan kebijakan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebermanfaatan KIA dapat tercapai secara lebih optimal.

REFERENSI

- [1] I. Zubaedah, S. Hajar, and J. Aulia, "Implementasi kebijakan pemerintah mengenai kartu identitas

- anak pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jakarta timur,” vol. 21, no. August, 2022.
- [2] M. F. N. Norarita , M. Arsyad, “Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara,” vol. x, no. x, pp. 37–44.
- [3] M. Melinda, Y. Wiyos, R. Masykuroh, and H. Kurniati, “Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Perspektif Siya < Sah Tanfiz | Iyyah Syar’iyyah Hukum Status Identitas Anak,” vol. 1, no. 4, 2024, doi: <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i4.475>.
- [4] R. A. Illahi, D. Kagungan, and V. Karmilasari, “Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung,” vol. 5, no. 1, pp. 17–32, 2023.
- [5] B. A. Puspita, Meiliyana, and A. Utami, “Evaluasi Context Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bandar Lampung,” vol. 7, no. 1, pp. 89–96, 2025.
- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, CV., 2022.
- [7] M. S. Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 1, no. 1. CV. syakir Media Press, 2021.
- [8] P. A. Pratama, D. G. Manar, and Supratiwi, “Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023,” 2023.
- [9] D. Andini, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital Pada Aplikasi Klampid New Generation Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Diana,” vol. 3, no. 2, pp. 173–181, 2023.
- [10] A. Mahsyar, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Kependudukan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat,” vol. 12, no. 1, pp. 1–10, 2024, doi: <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.10874>.